

OPTIMALISASI PENGAWASAN PERIJINAN REKLAME DI DINAS PERIJINAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur



Disusun Oleh :

ARI SATRIYA
NPM. 1041010018

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

”OPTIMALISASI PENGAWASAN PERIZINAN REKLAME DI DINAS
PERIJINAN KABUPATEN SIDOARJO”

Disusun Oleh :

Ari Satriya
NPM. 10410018

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Pembimbing

Dra. Sri Wibawani, MSi
NIP.196704061994032001

Mengetahui,
DEKAN

Dra.Ec. Hj. Suparwati,MSi
NIP. 1955 07181983022001

OPTIMALISASI PENGAWASAN PERIJINAN REKLAME DI DINAS PERIJINAN KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :

ARI SATRIYA
NPM.1041010018

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada Tanggal : 28 Maret 2014

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1. Ketua

Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP.196704061994032001

DR. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

2. Sekretaris

Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP. 196704061994032001

3. Anggota

Drs. Pudjo Adi, M.Si
NIP. 195105101973031001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 19550718 198302 2001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo. Tugas ini dibuat dalam memenuhi persyaratan kurikulum pada Program Studi ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

Dalam tersusunnya tugas ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Ibu Dra.Sri Wibawani M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Disamping itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Hj. Suparwati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
3. Bpk Tri Laksono selaku Kepala Humas Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo
4. Ibu Kasiatun selaku Bidang Perijinan Reklame Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo.
5. Seluruh pejabat, pegawai dan pembantu dilingkungan Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Buat Orang Tua dan Kakak saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama proses penyusunan laporan Skripsi ini.
7. Buat teman ku ady atmoko dan Bagus Sumaryanto yang telah memberikan dukungan baik moril maupun doa selama proses penyusunan laporan Skripsi ini.
8. Buat kedua adik aku teresia retno ariyanti dan Oksenti Vironita yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan laporan Skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan serta bantuan dalam penyusunan laporan Skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran, kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar persetujuan.....	iii
Lembar Revisi.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Landasan Teori.....	19
1. Pelayanan	20
a. Pengertian Pelayanan.....	20
b. Pelayanan Sebagai Proses	21
c. Tujuan Pelayanan	22

d. Bentuk –bentuk Layanan	23
2. Pelayanan Publik.....	24
a. Pengertian Pelayanan Publik.....	24
b. Prinsip –prinsip Pelayanan	25
c. Standart Pelayanan.....	27
d. Azas – azas Pelayanan Publik.....	28
3. Pengawasan	29
a. Definsi pengawasan.....	29
b. Tujuan pengawasan.....	31
c. Manfaat pengawasan.....	32
d. Unsur pengawasan.....	33
e. Proses yang dilakukan.....	34
f. Pengawasan kualitas.....	38
g. Pengawasan kuantitas.....	40
4. Optimalisasi Pelayanan Publik.....	42
a. Pengertian Optimalisasi	42
b. Optimalisasi Pelayanan Publik	43
c. Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Publik dan kendala –kendalanya	46
5. Perijinan	47
a. Definisi Perijinan.....	47
b. Sifat Izin	49
c. Waktu Penyelesaian Izin	50
d. Biaya Izin	51
e. Fungsi Pemberian Izin	52

f. Tujuan Pemberian Izin	52
5. Reklame	55
a. Definisi Reklame	55
b. Penyelenggara Reklame	55
c. Pemilik reklame	56
d. Jenis -jenis Reklame	56
C. Kerangka Berfikir.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Fokus Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian.....	63
D. Informan dan Teknik Penarikan Informan.....	63
E. Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisa Data	67
G. Keabsahan Data	70
BAB IV Hasil dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum instansi.....	72
1. Sejarah instansi.....	72
2. Dasar hukum.....	76
3. Struktur organisasi.....	77
4. Standart pelayanan publik.....	77
5. Jenis Pelayanan, Jangka Waktu, Masa berlaku.....	83
6. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Perijinan.....	86
7. Tahapan Pengurusan Izin.....	90
B. Hasil	92

1. Pengawasan Masa Berlaku Izin Reklame.....	93
a. Pengawasan Izin Reklame Tetap.....	94
b. Pengawasan Terhadap Pemberian Masa Berlaku Izin Reklame Tetap.....	96
c. Pengawasan Terhadap Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap yang akan habis masa berlakunya izin.....	106
2. Pengawasan Izin Reklame Terbatas.....	113
a. Pengawasan Terhadap Pemberian Masa Berlaku Izin Reklame Terbatas.....	114
b. Pengawasan Terhadap Masa Berlakunya Izin Reklame Terbatas yang Sudah Habis.....	118
3. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame yang Tidak Memiliki Izin.....	120
4. Pengawasan Terhadap Pajak Reklame.....	123
5. Pengawasan Terhadap Estetika dan Keindahan Kota.....	130
6. Pengawasan Kontruksi Bangunan dan Tata Ruang Kota.....	133
C. Pembahasan.....	141
1. Pengawasan Pada Masa Izin Berlakunya Reklame...	142
2. Pengawasan Pada Masa Izin Berlakunya Reklame Terbatas.....	145
3. Pengawasan Pada Pajak Reklame.....	148
4. Pengawasan Terhadap Estetika dan Keindahan Kota.....	151

5. Pengawasan Terhadap Kontruksi Bangunan reklame dan Tata Ruang Kota.....	154
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA.....	162
Lampiran	

ABSTRAKSI

ARI SATRIYA 1041010018 Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Fenomena Bahwa adanya suatu kondisi penempatan reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan masih banyak penyelenggaraan reklame yang melanggar estetikan dan merusak keindahan Kota serta masih ditemukan bangunan kontruksi reklame yang membahayakan pengguna jalan. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendiskripsikan dan mengetahui tentang bagaimana Optimalisasi Pengawasan perizinan reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan dinas perijinan, dinas satpol pp dalam menertibkan penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat di Kabupaten Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang memiliki satu variabel yaitu tentang bagaimana Optimalisasi Pengawasan perizinan reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo 1). Berdasarkan Hasil dari penelitian dan pembahasan maka menghasilkan kesimpulan Secara umum pengawasan perijinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo cukup optimal. 2). Optimalisasi pengawasan masa izin reklame tetap sudah tercapai dengan pengawasan preventif dan pengawasan rutin dan tidak ditemukan reklame tetap tanpa izin. sedangkan pengawasan masa izin reklame terbatas belum optimal dikarenakan masih banyak penyelenggara reklame terbatas tanpa izin dan dilakukan pembongkaran oleh tim reklame. 3). Optimalisasi pengawaan terhadap pajak reklame sudah tercapai. 4). Optimalisasi pengawasan estetika dan keindahan kota perizinan reklame belum optimal dikarenakan masih ditemukan perletakan reklame yang masih kurang tertata dan terlalu berdekatan tetapi tidak ditemukan reklame yang mengganggu fungsi jalan dan pengguna jalan di Kabupaten Sidoarjo. 5). Optimalisasi pengawasan kontruksi dan tata ruang kota penyelenggaraan reklame kurang optimal dikarenakan masih beberapa media reklame yang melakukan perpanjangan papan besi reklamennya masih keropos dan belum diganti dengan kontruksi besi yang baru. Sedangkan optimalisasi kawasan penempatan reklame sudah optimal dimana zona kawasan kendali ketat tidak ditemukan reklame, pada zona kawasan kendali sedang diawasi penyelenggaraan reklame dengan melihat penempataanya, dan kawasan kendali khusus dilakukan dengan mengawasi penempatan reklame dengan melihat bebagai aturan dan syarat tertentu.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Oleh karena itu dibutuhkan sikap pemerintah yang proaktif. Salah satu peran serta pemerintah selaku penguasa terhadap aktivitas masyarakatnya adalah melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan pemerintah mengatur semuanya mulai dari mengarahkan, melaksanakan bahkan mengendalikan.

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari tetapi sangat berperan penting bagi kehidupan kita, namun banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum.

Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.

Selama ini terlihat bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten kepada warga masyarakat, sering menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini tampak dari banyaknya keluhan masyarakat itu sendiri atau melalui media massa yang ditujukan kepada

pemerintah kabupaten, seperti dalam berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Izin termasuk layanan publik karena orang yang memanfaatkan layanan tersebut harus membayar sesuai tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin atau perizinan yang merupakan jasa publik harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten selaku penyelenggara pemerintahan. Sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi legal/resmi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan.

Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit.

Berdasarkan Buku profil BPPT tahun 2003 ada berbagai macam bentuk izin yakni pengurusan mendirikan tempat hiburan, izin mendirikan Rumah Makan, izin produksi makanan dan minuman, izin membuka warnet dan wartel serta izin pemasangan iklan atau Reklame atau spanduk. Iklan merupakan salah bentuk promosi yang seringkali dilakukan oleh suatu perusahaan agar produk tersebut dikenal oleh masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer 7 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame Pada dasarnya reklame yang ada di

seluruh kota maupun di kabupaten di bagi berbagai bentuk dan jenis –jenis reklame, jenis –jenis reklame tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Reklame papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
2. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
4. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm²per lembar.
5. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
6. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

7. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
8. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
9. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
10. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
11. Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu dan sejenisnya yang berukuran minimal 2 x 4 meter.

Berdasarkan buku Manajemen Administrasi Perkantoran Modern (Sukoco. 2007). Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen disamping fungsi- fungsi manajemen lainnya. Pengawasan adalah merupakan proses serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan dipelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam pengertian yang lain pengawasan diartikan sebagai setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun Bentuk-bentuk pengawasan menurut obyeknya, terdiri atas :

1. Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot : di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.
2. Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2009 pasal 24 yang berisi, pengawasan penyelenggara reklame dilakukan terhadap aspek masa berlakunya izin, perpajakan, estetika dan keindahan, konstruksi bangunan reklame dan tata ruang.

Namun dalam kehidupan sehari-hari terkadang masyarakat di buat takut karena keberadaan papan Reklame yang berdiri atau terpasang di atas toko, di median jalan, maupun di pinggir jalan, di karenakan papan reklame yang terpasang tidak sesuai prosedur yang telah di tetapkan oleh dinas perijinan di daerah tersebut atau papan reklame tersebut tidak memiliki keamanan yang tinggi.

Reklame- reklame liar tersebut terpasang di median jalan, baik di dalam wilayah jalan desa yang bukan jalan raya seperti di pinggir kota. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak ditindak tegas maka kenyamanan dan keindahan

kota akan terganggu, serta dapat mengurangi pendapatan asli daerah suatu kabupaten.

Pemasangan reklame yang semakin liar akan banyak menimbulkan permasalahan di wilayah Kota maupun di Kabupaten. Permasalahan pertama akan menimbulkan estetika dan keindahan kota akan berserakan dan menghalangi keindahan kota. Permasalahan kedua akan menimbulkan permasalahan dari segi ekonomi, retribusi pendapatan daerah akan menurun karena adanya pemasangan reklame liar yang tidak membayar biaya retribusi pajak setiap bulanya. Permasalahan yang ketiga akan menimbulkan masalah adanya masa izin berlakunya telah habis dikarenakan pemasangan reklame yang masa izinya habis bila tidak di tindak lanjuti maka akan merugikan pendapatan daerah Kota maupun Kabupaten. Permasalahan keempat adalah apabila adanya pemasangan reklame liar akan menimbulkan masalah adanya bangunan reklame liar yang konstruksi bangunan tidak sesuai dan merusak bangunan yang ada di sebelahnya maupun di sekelilingnya.

Penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengawasan perijinan reklame di Kabupaten Sidoarjo. Karna adanya permasalahan masih banyaknya pelanggaran pemasangan reklame liar. Hal ini di buktikan dengan adanya berita pelanggaran izin pemasangan reklame, berita tersebut berisi :

Sangatlah miris jika melewati jalan protokol di kota Sidoarjo, secara blak-blakan mereka melakukan perlawanan aturan main yang berlaku, RTH (Ruang terbuka Hijau) dan bahu jalan pun dibantai habis oleh pemasangan

reklame, yang menjadi pertanyaan besar siapakah dalang dibalik keberanian para penggiat reklamie liar (melanggar) tersebut?.

Penertiban yang dilakukan pihak Pol PP pun sebatas ‘kelas bebek’ (yang kecil saja) sedangkan yang berskala besar dan jelas – jelas melanggar lebih mengambil sikap abstain alias apa kata nanti.

Tingkat pelanggaran reklame yang berdiri dititik terlarang mendominasi hingga 75% nya, permasalahan ini tidak bias dibiarkan berlarut. Dalam waktu dekat kami selaku warga Sidoarjo akan melayangkan surat klarifikasi pada pihak terkait terkait keberadaan reklame, baik yang legal maupun yang bodong”, ujar Johnson dengan nada kesal.

Hasil pengamatan deliknews dilapangan ,memang banyak reklame melanggar garis sempadan, bahkan hampir 45% reklame berdiri diatas ruang terlarang, bahkan pendirian reklame terus digencarkan, seperti milik salah satu pengembang Jayaland diakses keluar Tol Sidoarjo berdiri dengan megah.

(sumber surya online tanggal 8 juli 2013)

Maka dari itu peneliti ingin mengkaji pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer 7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame, apakah sudah sepenuhnya terlaksana dengan baik dan benar yang berdasarkan isi dari peraturan daerah tersebut.

Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Sidoarjo diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Sidoarjo No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disingkat dengan Perda Reklame). Dimana dalam ketentuan Bab II tentang

Perencanaan Penempatan Reklame pasal 2 menentukan mengenai apa yang dimaksud dengan Penempatan letak Reklame, yakni :

- “(1) Penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana wilayah, serta tidak boleh mengganggu fungsi jalan dan/atau tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari :
 - a. Kawasan reklame yang meliputi :
 - 1) kawasan kendali ketat ;
 - 2) kawasan kendali sedang ; dan
 - 3) kawasan khusus.
 - b. Kawasan tanpa reklame (white area). ”

Dalam penyelenggaraan pemasangan reklame, Kabupaten Sidoarjo menerapkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2009 Tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame. Pada pasal 3 yang berisi tentang :

- “(1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan pada titik –titik reklame.
- (2) Titik –titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada :

- a. Pada segmen Buduran, Jenggolo, Ahmad Yani, Gajah Mada, Mojopahit, Candi, Larangan, Diponegoro, Pahlawan, Lingkar Barat.
 - b. Di luar segmen sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3). Segmen –segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kawasan kendali ketat.
 - (4). Perletakan reklame pada titik –titik reklame pada segmen –segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan pengawasan secara ketat dengan dibatasi pemanfaatnya sesuai desain dan jumlah titik reklame.
 - (5). Desain dan jumlah titik reklame pada segmen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
 - (6). Perletakan reklame dalam segmen yang tidak sesuai dengan desain dan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah ada kajian teknis dari Tim Reklame dan Konsultan ang berkompeten.
 - (7). Kawasan diluar segmen sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kawasan kendali sedang dan kawasan khusus.
 - (8). Perletakan reklame pada kawasan diluar segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setelah dilakukan kajian oleh tim reklame.

- (9). Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam gambar Tata Letak Bangun Reklame (TLBR) oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana reklame yang dimohon.

Pada peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 pasal 8 berisi tentang perletakan reklame pada tempat –tempat tertentu, isi dari pasal 8 ialah sebagai berikut :

- (1). Dilarang melakukan peletakan reklame pada :
 - a. kantor pemerintah.
 - b. halaman pendidikan milik pemerintah dan tempat –tempat ibadah.
 - c. lokasi white area yaitu alun –alun.
 - d. Gedung –gedung Cagar budaya.
 - e. Pohon dan tanaman penghijauan dalam sarana dan prasarana pemerintah.
- (2). Lokasi white area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tertuang dalam lampiran Peraturan ini.
- (3). Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perletakan reklame untuk penyelenggaran reklame yang hanya semata –mata memuat antara lain : nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster –poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi, dengan syarat :

- a. diselenggarakan pada halaman.
- b. diselenggarakan menempel pada gedung/bangunan.
- c. ukuran luas reklame dengan ketentuan tidak melebihi 625 cm².

Menurut surya online sidoarjo tanggal 20-09-2013 Kasus-kasus dalam penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Sidoarjo telah banyak kita jumpai pelanggarannya di berbagai media, dimana salah satu kasusnya adalah banyaknya Reklame dan Bando yang menghiasi jalan Trotoar, Halte bus, Pulau jalan, median. Pergub yang ada, hanya mengizinkan pemasangan di daerah tertentu seperti Buduran, Jenggolo, Ahmad Yani, Gajah Mada, Mojopahit, Candi, Larangan, Diponegoro, Pahlawan, Lingkar Barat, dengan Desain dan jumlah titik reklame.

Dengan semakin banyaknya reklame yang bermunculan dengan berbagai bentuknya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap pemasangan reklame tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang secara tidak langsung menjadi tugas yang juga harus segera diselesaikan sehingga dapat menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat

Menurut, Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menegaskan, median jalan, trotoar dan pulau jalan adalah bagian jalan yang harus bersih dari reklame. Pasalnya, pesan yang disampaikan dalam reklame justru bisa membuat celaka pengguna jalan. “Perda yang kami bahas terkait badan jalan sudah rampung tinggal menunggu koreksi dari gubernur saja. Kalau itu sudah turun fungsi trotoar dan media jalan harus dilaksanakan,” katanya. Politisi PDIP yang masuk dalam pembahasan Raperda Badan Jalan saat itu, trotoar di sepanjang Jl Pahlawan, Jl A Yani telah banyak terpasang. Hal ini yang menyulitkan pejalan kaki di

trotoar, karena harus berhadapan dengan besi. Banyaknya trotoar di median, pulau jalan dan trotoar bukan menambah keindahan kota, tapi justru menjadi pemandangan yang ruwet. “Memang reklame itu bisa mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi harus diberlakukan dengan benar tidak harus dipasang melintang di jalan atau dibagian jalan lainnya,” jelasnya.

(Sumber : surya online sidoarjo, tanggal 20-09-2013.)

Kasus lain yang ada di sidoarjo tentang pelanggaran izin reklame yaitu. Menurut informasi yang dihimpun di internal kejari, tim memang tengah mengembangkan sayap penyelidikan. Tidak hanya mengusut seluruh reklame milik Asr, owner CV Delta Rama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, korps Adhiyaksa juga mencari data terkait dengan status sejumlah reklame yang hingga kini ternyata berdiri meger –meger. Posisis reklame itu dinilai janggal. “sebab, saat materi reklame lain sudah dicopot, ada bando yang masih memasang materi. Soal reklame apa saja, kami tunggu perkembangan,” ujar sumber di internal kejari.

Berdasar pantauan di lapangan, ada sejumlah reklame yang hingga kini berdiri tegak. Salah satunya, deretan bando di Raya Waru. Satu reklame bando ada di depan kantor Badan Kepegawaian Nasional (BPN) Regional II. Dua lainnya berada di flyover Waru. Bagaimana kelanjutan penyidikan terhadap CV Deltarama? Menurut informasi yang diperoleh, kejari masih menunda kelanjutan penyidikan kasusu tersebut.

Tim pengusut tengah menunggu kehadiran sejumlah pihak yang terkait dengan reklame yang bermasalah. Di antaranya, beberapa pejabat pemkab, sebab, hasil penyidikan awal mengungkapkan bahwa Asr sebenarnya sudah membayar pajak – pajak atas reklame yang miliknya.

(sumber jawa pos, Kamis 21 November 2013)

Menurut kasus di atas masih lemahnya penegakan terhadap pengawasan pemasangan reklame liar atau reklame yang izinnya telah habis, di karenakan wilayah Kabupaten Sidoarjo sangat strategis karena wilayah Kabupaten Sidoarjo sering dilewati oleh masyarakat dari luar kota. Sehingga sangat cocok dan bagus dalam mempromosikan suatu produk atau promosi seseorang melalui media reklame. Lemahnya pengawasan terhadap pemasangan reklame atau adanya reklame liar dikarenakan kurangnya tenaga tim pengawas reklame

yang ada di BPPT Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 9 orang yaitu Dinas Satpol PP, Dinas Dispenda, Dinas Perhubungan, Dismagara, Cipta Karya, Dinas DKP, Dinas Hukum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perijinan.

Apabila peraturan daerah tersebut dibuat untuk menertibkan atau melarang pemasangan reklame bando di jalan umum, maka seharusnya tidak ada pemberian izin pemasangan reklame di manapun di sepanjang jalan Sidoarjo tanpa alasan apapun.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya melalui sebuah penelitian. Perumusan masalah penelitian ini adalah :

“Bagaimana Optimalisasi Pengawasan perijinan reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang :

“Pengawasan perijinan reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk

menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Bagi Dinas Perijinan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Badan Perijinan Kabupaten Sidoarjo.
3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “VETERAN” JATIM, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.